

BAB V

P E N U T U P

1.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dan pembahasan, selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Posisi unggulan pada sumber pajak terdapat pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak rokok. Posisi unggulan pada sumber retribusi terdapat retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Posisi unggulan pada sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Bagian Laba Lembaga Keuangan. Dan Posisi unggulan dari sumber Lain-lain PAD yang Sah adalah Pendapatan Bunga.
2. Posisi potensial pada sumber pajak ditempati oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Rokok. Posisi potensial dari sumber retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Posisi potensial dari sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Bagian Laba Lembaga Keuangan. Posisi potensial dari sumber lain-lain PAD yang sah adalah Pendapatan BLUD. Artinya komponen - komponen ini masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sumber unggul.
3. Posisi berkembang dari sumber pajak, ditempati oleh pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Posisi berkembang dari sumber retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Usaha. Posisi berkembang dari sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Sedangkan

Posisi Berkembang dari sumber Lain-lain PAD yang Sah adalah Tuntutan ganti kerugian daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Artinya komponen - komponen ini masih sangat bisa dikembangkan, agar dapat meningkat ke kuadran potensial atau Unggul.

4. Posisi terbelakang dari sumber pajak ditempati oleh pajak air permukaan, dari sumber retribusi daerah adalah Retribusi Perijinan Tertentu. Posisi terbelakang dari sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta. Posisi Terbelakang dari sumber Lain-lain PAD yang Sah adalah Penerimaan jasa giro, Pendapatan denda pajak, Pendapatan dari pengembalian, Pendapatan dari angsuran/cicilan Penjualan dan Pendapatan dari Penyisihan Piutang.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dan pembahasan, selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Provinsi NTT melalui instansi terkait hendaknya dapat memprioritaskan sumber-sumber penerimaan PAD kategori unggulan dan potensial seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak rokok, retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, Bagian Laba Lembaga Keuangan, Pendapatan BLUD, Pendapatan Bunga, dan lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan pendapatan daerah, hal itu tentu tanpa mengabaikan sumber-sumber berkembang dan terbelakang seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, Retribusi Perijinan Tertentu, bagian Laba Atas Penyertaan Modal

pada Perusahaan Milik Daerah, bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Lain-lain PAD yang sah, pendapatan denda pajak, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari pengembalian, Pendapatan dari angsuran/cicilan Penjualan, dan Pendapatan Dari Penyisihan Piutang. Karena itu kedua posisi ini harus dipertahankan dan dijaga stabilitas pertumbuhan agar tetap menjadi sumber utama penerimaan daerah. Sumber potensial biasanya memberikan kontribusi yang besar dalam PAD, namun laju pertumbuhannya lambat dan apabila tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah sumber ini bisa saja akan berubah menjadi tertinggal.

2. Sumber-sumber pendapatan daerah yang terdapat pada posisi Berkembang dan Terbelakang seperti pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, Retribusi Perijinan Tertentu, bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Lain-lain PAD yang sah, pendapatan denda pajak, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari pengembalian, Pendapatan dari angsuran/cicilan Penjualan, dan Pendapatan Dari Penyisihan Piutang juga perlu mendapat perhatian serius agar dapat meningkatkan kontribusinya dalam PAD dan dapat bergeser ke posisi Unggulan atau Potensial sehingga dapat menambah penerimaan PAD.
3. Pemerintah Daerah dapat menjadikan sumber berkembang sebagai potensi atau sumber pendapatan baru bagi daerah karena dengan laju pertumbuhan sumber yang tinggi, kontribusi sumber berkembang masih dapat ditingkatkan lagi. Pemerintah daerah sebisa mungkin terus mengarahkan sumber terbelakang agar kontribusinya bertambah dan

bergeser menjadi sumber berkembang. Pemerintah daerah perlu meminimalkan adanya sumber terbelakang atau setidaknya menjaga agar sumber ini tidak bertambah jumlahnya.

4. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan dan melakukan penegakan hukum dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak serta melakukan pengendalian dan pengawasan atas pungutan sumber-sumber PAD.
5. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik kewajiban formal maupun material dibutuhkan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak agar wajib pajak memahami manfaat dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah dan menyadari pentingnya ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memiliki rasa kerelaan dan suka rela dalam membayar pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah,Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grasindo
- Barata, Adya Atep. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima cet 2*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks.
- Deddy, Dadang Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fauzi, Achmad dan Iskandar. 1984. *Cara Membaca APBN*. Malang: Brawijaya University Press.
- Ferdinand, Augusty, 2014. *“Metode penelitian, Manajemen, Pedoman Penelitian untuk penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen, Edisi 5 2014*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Fernandez, Joe. 2002. *Otonomi Daerah di Indonesia Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta*. Jakarta: IPCOS
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN
2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah edisi 2*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Hariadi, Pramono, dkk, 2010., *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Purwokerto: Salemba Empat.
- Harits, Benyamin, 2002. *Peranan Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Prisma.
- Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. Edisi III*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga

Mamesah, D. J., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset

Musgrave, Richard dan Peggy B, 1993 “*Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*” Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nasution. 2003. “*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*”. Bandung: Tarsito.

Salomo. Roy. V, M. Ikhsan. 2002 “*Keuangan Daerah di Indonesia*”, Jakarta: STIAD.

Syaukani, H. R. 2000 “*Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*”, Tenggarong – Kalimantan Timur: Penerbit Gerbang Dayaku.

Jurnal

Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. Accountability in Local Government revenue Management: who does what?. *Journal of Sustainable Development*. 2(8).

Isdijoso, B. 2002. “Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)”. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*. Vol. 6 No. 1.

Kusuma Arsana., dan I M. Budi. 2013. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pajak Reklame serta Prospeknya di Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 2(4):190-199.

Lucky, Dihan. 2013. Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(19):7-18.

- Machmud, M., G. Kawung, dan W. Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 14 No. 2: 1-13.
- Norregaard, John. 2013. *Taxing Immovable Property: Revenue Potential and Implementation Challenges*. IMF Working Paper, 13(129).
- Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*, 8(2):105-113.
- Tyasani Taras, Luh Gede Sri Artini. 2017 “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali “ *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 6, No. 5, 2017: 2360-2387
- Uhunmwuangho, S.O., and Stanley Aibieyi. 2013. Problems of Revenue Generation in Local Government Administration in Nigeria. *Business and Management Research Journal*, 2(3):89–96.
- Warner, Mildred E. 2012. Local Government Financial Capacity and The Growing Importance of State Aid. *Rural Development Perspectives*, 13(3):27-36.
- Zouhaier, Hadhek. 2011. Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*, 4(2):152-162

Majalah

- Halim, Abdul dan Jamal A. Nasir. 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Malang”.
Majalah Manajemen Usahawan Indonesia. No. 06/Tahun XXXV

Tesis

- Loe, Yessy Noviyanty, 2015 “*Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Rote Ndao*” Kupang,
Universitas Nusa Cendana Kupang
- Ly Yakob. 2016 “ *Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kupang* “ Kupang, Universitas Widya Mandira Kupang
- Mone, Dessy Ivony, 2015 “*Analisis Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Rote Ndao*” Kupang,
Universitas Nusa Cendana Kupang
- Pontoh, Paula, 2013, “*Efektifitas dan Kontribusi pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah*” Sulawesi Utara, Universitas Sumatera Utara

Pratama, Ignatius, 2010, “*Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta*”. Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Radho, Marthina, 2012 “ *Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kota Kupang*” Kupang, Universitas Widya Mandira Kupang

Ratuhalin, Morina Leonora, 2015 “ *Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Kupang Tahun 2010-2013*. Universitas Nusa Cendana Kupang

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004. Depdagri RI.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, 2004. Depdagri RI.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri, Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri, Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.